

Luas panen adalah luas tanaman sayuran dan buah-buahan semusim yang diambil hasilnya/dipanen pada periode pelaporan.

Luas Panen Sayuran dan Buah semusim Kabkota 2023 yaitu 18.157 hektare.

Pisang merupakan buah yang memiliki kontribusi produksi terbesar di Kalbar

Timun merupakan sayuran yang memberikan kontribusi produksi terbesar di Kalbar

Sayuran dan Buah Semusim

Merupakan tanaman sumber vitamin, mineral dan lain-lain yang dikonsumsi, yang berumur kurang dari satu tahun. Jenis sayur dan buah semusim seperti bayam, kangkung, sawi, tomat, dan lain-lain.

Naik 18,91%
PRODUKSI BUAH DAN SAYURAN TAHUNAN 2023 SEBESAR 571 RIBU TON



STATISTIK

Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Provinsi Kalimantan Barat

BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Jl.Sutan Syah II No.24/42 Pontianak 78116
telp.0651-735245, 764741, fax.0651-732184
email: bps@kbs.go.id

STATISTIK

Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Provinsi Kalimantan Barat

Produksi Sayuran

BERDASARKAN DATA STATISTIK PERTANIAN HOLTIKULTURA (SPH) TAHUN 2023

PRODUKSI SAYURAN ADALAH SEBESAR 55.354,36 TON, TURUN 5,56 PERSEN DIBANDING TAHUN 2022.

Produksi Buah dan Sayur Terbesar

Timun	16,34%	Cabai Rawit	14,96%
Kacang panjang	11,81%	Terung	10,37%
Pisang	25,80%	Nanas	25,80%
Jeruk Siam	19,41%	Durian	9,42%
Sayur lainnya < 10 %	22,68%	Sayur lainnya	> 10 %

Komoditas Unggulan

JERUK SIAM
88.118,98 TON
KABUPATEN SAMBAS

PISANG
57.351,52 TON
KABUPATEN MEMPAWAH

NANAS
43.644,31 TON
KABUPATEN MEMPAWAH

MENTIMUN
1.591,33 TON
KABUPATEN MEMPAWAH

CABAI RAWIT
1.328,40 TON
KABUPATEN MELAWI

KACANG PANJANG
> 1.264,20 TON
KABUPATEN MELAWI



Produksi sayuran dan buah semusim Kalimantan Barat terbesar yaitu pada tahun 2021 dengan total produksi sebesar 59.661,5 ton.

Pada tahun 2023, produksi sayuran dan buah semusim tertinggi di Kalimantan Barat berada di Kabupaten Sintang dengan produksi mencapai 7.159,3 ton.

Sedangkan, produksi sayuran dan buah semusim terendah di Kalimantan Barat berada di Kabupaten Sekadau dengan produksi sebesar 258,2 ton.

TINGKAT HUNIAN KAMAR HOTEL PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2022

TINGKAT PENGHUNIAN KAMAR (TPK) HOTEL BINTANG



RATA-RATA LAMA MENGINAP TAMU (RLMT) HOTEL NON BINTANG



Tingkat penghunian kamar (TPK) hotel menunjukkan perbandingan jumlah kamar yang ditempati dengan jumlah kamar yang tersedia pada suatu usaha pemotongan.

TINGKAT PENGHUNIAN KAMAR HOTEL NON BINTANG

KAMAR < 10	7,01
KAMAR 10-24	28,61
KAMAR > 40	25,51
KAMAR 25-40	34,87

Hotel Non Bintang/Melati adalah usaha penyediaan akomodasi bagi umum yang dikelola secara komersial menggunakan seluruh bagian bangunan yang belum memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang, tetapi telah memenuhi kriteria sebagai hotel melati yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinnanya (Dinas Pariwisata Daerah).



RATA-RATA LAMA MENGINAP TAMU (RLMT) HOTEL BINTANG



TINGKAT HUNIAN KAMAR HOTEL PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2022

TINGKAT PENGHUNIAN KAMAR (TPK) HOTEL BINTANG



RATA-RATA LAMA MENGINAP TAMU (RLMT) HOTEL NON BINTANG



Tingkat penghunian kamar (TPK) hotel menunjukkan perbandingan jumlah kamar yang ditempati dengan jumlah kamar yang tersedia pada suatu usaha pemotongan.

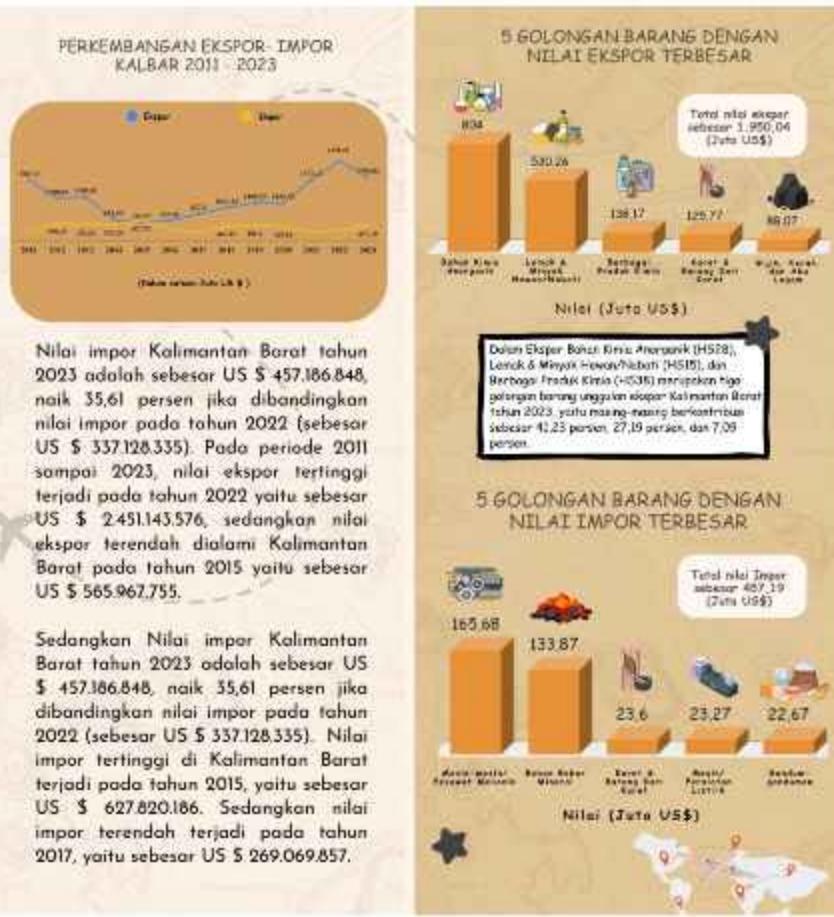
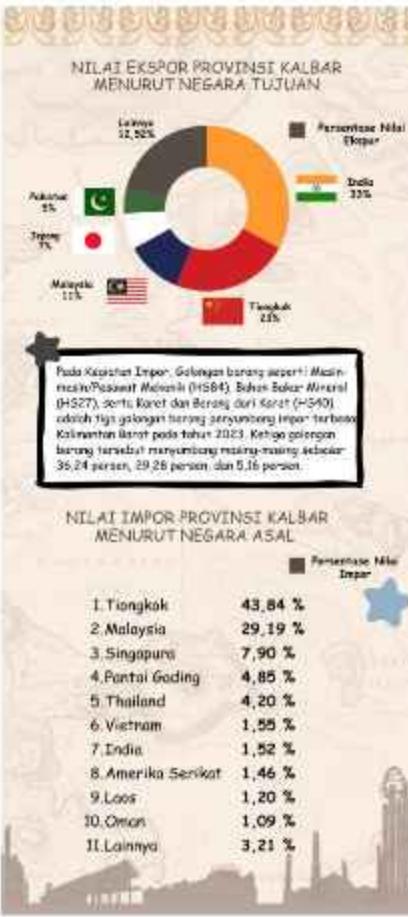
TINGKAT PENGHUNIAN KAMAR HOTEL NON BINTANG

KAMAR < 10	7,01
KAMAR 10-24	28,61
KAMAR > 40	25,51
KAMAR 25-40	34,87

Hotel Non Bintang/Melati adalah usaha penyediaan akomodasi bagi umum yang dikelola secara komersial menggunakan seluruh bagian bangunan yang belum memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang, tetapi telah memenuhi kriteria sebagai hotel melati yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinnanya (Dinas Pariwisata Daerah).

RATA-RATA LAMA MENGINAP TAMU (RLMT) HOTEL BINTANG





INFLASI (Y-O-Y) MENURUT KELLOMPOK PENGELUARAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT



INFLASI (Y-O-Y) DI KALIMANTAN BARAT 2023



IHK

Sintang
124,26

Pontianak
116,61

Singkawang
115,08

Pendorong Utama Komoditas IHK

- Sintang**
beras, daging ayam ras dan gula pasir
- Pontianak**
beras, tarif angkutan udara dan rokok kretek filter
- Singkawang**
beras, rokok kretek filter dan bawang putih



INDEKS HARGA KONSUMEN DAN LAJU INFLASI GABUNGAN 3 KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2023

BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

INDEKS HARGA KONSUMEN (IHK)

IHK merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen, khususnya di daerah perkotaan.

Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga.

Inflasi di Indonesia diukur dari persentase perubahan IHK dan diumumkan ke publik setiap awal bulan (hari kerja pertama) oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Tingkat perubahan IHK (inflasi/deflasi) yang terjadi mencerminkan daya beli dari uang yang dipakai masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Semakin tinggi inflasi, semakin rendah nilai uang dan daya belinya.

TINGKAT INFLASI GABUNGAN 3 KOTA IHK DI KALIMANTAN BARAT

merupakan gabungan dari 3 kota inflasi yang berada di provinsi ini yaitu Pontianak, Singkawang dan Sintang.

Selama tahun 2023, tingkat inflasi bulanan gabungan 3 kota IHK Kalimantan Barat berada di rentang -0,31 persen hingga 0,56 persen. Secara umum tingkat inflasi ini relatif berfluktiasi setiap bulannya.

INFLASI (Y-O-Y) PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023

2,02%

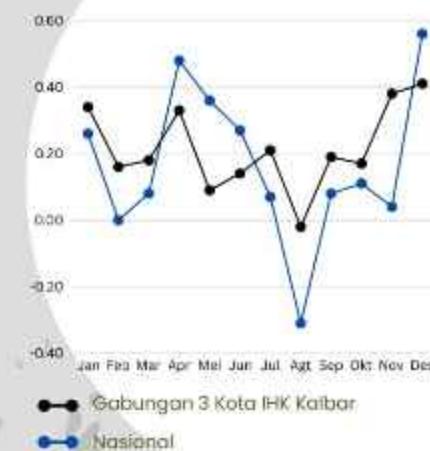
lebih rendah dari angka Nasional yang sebesar 2,61 persen.



IHK DESEMBER 2023

117,09

PERKEMBANGAN INFLASI UMUM BULANAN NASIONAL DAN GABUNGAN 3 KOTA IHK DI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023 (PERSEN)



Pada bulan Agustus, gabungan 3 Kota IHK di Kalimantan Barat mengalami arah pergerakan inflasi sedangkan nasional mengalami arah pergerakan deflasi.

Perkembangan Andil Bulanan
20 Komoditas Bahan Pokok
di Tiga Kota IHK Kalimantan Barat



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Inflasi dan Andil Komoditas Bahan Pokok Provinsi Kalimantan Barat **2023**

Kalimantan Barat sejauh ini belum mengalami inflasi yang signifikan sejak awal tahun 2023. Namun, beberapa komoditas seperti beras, minyak goreng, gula, tempe, daging, dsb. mengalami peningkatan harga. Untuk mendukung survei harga konsumen, BPS Kalbar telah memperluas jaringan survei di seluruh wilayah Kalimantan Barat.

**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Survei harga konsumen (SHK) dilakukan di seluruh wilayah Kalimantan Barat untuk mendapatkan data harga komoditas pokok yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Data ini akan digunakan untuk menilai tingkat inflasi dan perubahan harga komoditas pokok di Kalimantan Barat.

INFLASI

Persentase perubahan harga barang dan jasa sejauh ini dalam suatu wilayah dari waktu ke waktu. Inflasi dikenal dengan meningkatnya indeks harga konsumen (IHK), yang mencerminkan perubahan harga dan ukuran barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Inflasi yang tinggi dapat mengakibatkan kenaikan biaya hidup, sementara inflasi yang rendah memudahkan stabilitas harga.

APA ITU INDEKS HARGA KONSUMEN?

Indeks harga konsumen (IHK) adalah indeks yang mengukur perubahan harga barang dan jasa yang dibutuhkan untuk membeli barang atau jasa pada posisi yang sama pada masa yang lalu. IHK merupakan indikator yang penting dalam pengukuran inflasi, dengan memberikan informasi tentang perubahan harga komoditas di antara tangan penghasil dan tangan pembeli.

BAGAIMANA MENERAPKAN IHK?

IHK dapat digunakan untuk melihat perubahan harga suatu barang atau jasa sejak beberapa waktu yang lalu. Misalnya, jika IHK setiap bulan naik, maka harga barang tersebut juga akan naik. Sebaliknya, jika IHK turun, maka harga barang tersebut juga akan turun.

KOMODITAS BAHAN POKOK

Barang-barang yang sangat penting bagi kebutuhan masyarakat setiap hari, seperti beras, minyak goreng, gula, tempe, daging dsb. yang memiliki kontribusi terhadap perupaan harga terhadap inflasi. Komoditas ini merupakan barang-barang yang sering kali mengalami perubahan harga yang signifikan.

3 KOTA INFLASI

di Kalimantan Barat Tahun 2023

1. Kota Sungai Penuh
2. Kota Pontianak
3. Kota Sintang



Pengukuran inflasi di Indonesia berulang setiap Januari 2023, menggunakan tahun dasar 2010=100, berdasarkan Survei Hidup (SHH) 2016 yang mencakup 20 kota termasuk kota besar seperti Singkawang. Pengukuran komoditas bersifat dari COICOP 1999 ke COICOP 2010 dengan total 136 komoditas tertulis menjadi tiga komponen: Untuk Kalimantan Barat, Pontianak, Singkawang, dan Sintang terlibat dalam pengukuran inflasi, dengan masing-masing memiliki 375, 354, dan 248 komoditas. Data harga dikumpulkan melalui Survei Harga Konsumen di berbagai outlet, dengan pemandian sampai ke pasar domino konsumen lokal.

20 Komoditas Bahan Pokok

1. Beras	11. Tepung terigu
2. Daging sapi	12. Udang basah
3. Tahu ayam ras	13. Ikan keriting
4. Bawang merah	14. Mie kering instan
5. Cabai merah	15. Tempe
6. Cabai rawit	16. Tahu mentah
7. Minyak goreng	17. Pisang
8. Gula pasir	18. Susu bubuk batita
9. Bawang putih	19. Susu bubuk
10. Daging sapi	20. Jeruk

20 Komoditas dipilih berdasarkan komoditas yang memiliki share tertinggi dan pemimpin utama dalam inflasi Month to Month kelompok bahan pangan, serta sejalan dengan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan.

BPS Provinsi Kalimantan Barat

f @bpskalbar

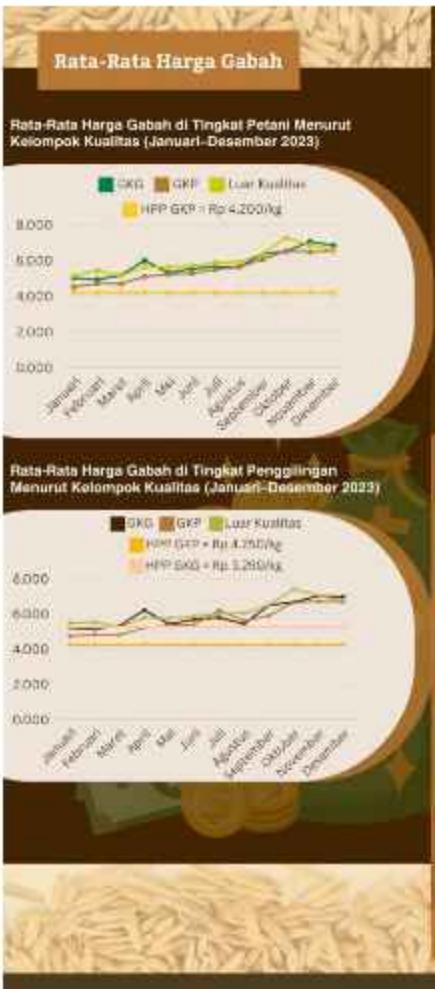






Konektivitas maritim yang kuat adalah kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia, khususnya di wilayah Kalimantan Barat. Efisiensi transportasi laut, yang sangat bergantung pada kinerja pelabuhan, menjadi faktor penting dalam menghubungkan pulau-pulau dan meningkatkan daya saing regional.



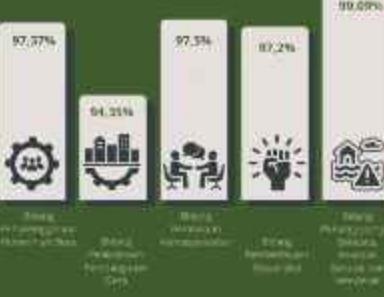


Belanja Desa

Adalah jenis pengeluaran yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan pemenuhan penduduk desa. Sumber para biaya belanja pemerintah desa dibagi menjadi lima, yakni: bantuan alokasi anggaran pemerintah desa, bantuan pemerintah pembangunan desa, bantuan pemerintah kemandirian desa, bantuan pemerintah kemandirian desa, dan bantuan pemerintah desa dalam bentuk dana desa dan bantuan.

Rentasannya pada tahun 2022 memanfaatkan hasil kerja bersama dengan anggaran tahun 2022. Untuk kurun waktu 2021-2022, mengalami peningkatan jumlah pembaharuan desa. Pada tahun 2022, anggaran belanja desa yang dibangun pertama kali mencapai krediter konsumsi dan mendekati setengah pada 2021 selama yang cukup besar, yakni sebesar 45,2%.

Percapaian Realisasi Belanja Desa di Provinsi Kalimantan Barat Menurut Bidang Tahun 2022



Anggaran Belanja



Pada 2023, Kabupaten Sintang merupakan Kabupaten yang memiliki anggaran desa pemerintah desa **tertinggi** sebesar Rp45,8 M. Sedangkan Kabupaten Kayong Utara memiliki anggaran desa pemerintah desa **terendah**, yaitu sebesar Rp9,959 M.

Perbedaan anggaran belanja yang sangat signifikan diketahui ketika Kabupaten/kota memiliki kondisi dan keterbatasan yang berbeda, begitu pula ukuran ekonomi dan jumlah desa yang beragam. Selain prioritas pemerintah dalam pembangunan daerah juga merupakan salah satu faktor perbedaan anggaran belanja pemerintah desa tiap Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.



STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DESA 2023 & 2024

PROVINSI KALIMANTAN BARAT



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Jl. Sultan Syarif Hk. 2482, Pekanbaru, 28330
Telepon: (071) 723.154
Email: lps@dkpp.kkp.go.id



Desa

Adalah unit pemerintahan terkecil. Desa merupakan satuan pemerintahan yang membangun nasional, pembangunan regional, komunitas, dan pembangunan di desa. Desa diharapkan mampu menggerakkan modal lokal untuk berperan dalam pembangunan. Memerlukan dukungan administrasi dan mendukung kinerja desa dengan baik dan efektif.

Pendapatan Desa

Selain sumber pemerintah yang meliputi anggaran desa yang mencakupkan tata kelola dan tata kewajiban yang tidak termasuk dalam kategori desa, Pendapatan desa di bawah ini adalah **pendapatan asli desa**, **pendapatan transfer**, dan **pendapatan lain-lain**. Pendapatan ini akan berdampak pada hasil kesejahteraan, hasil hidup sosial, perekonomian, dan kesejahteraan sosial di desa. Karena itu, anggaran ini penting, namun harus sesuai APBD (anggaran Pendapatan dan Belanja).

Anggaran Pendapatan Pemerintah Desa Kalimantan Barat (Miliar Rupiah)

Jenis Pendapatan	2022	2023
Pendapatan Asli Desa	18,9	16
Pendapatan Transfer	2.889	2.883
Pendapatan Lain-lain	4,5	1,3

Pendapatan Asli Desa

Yaitu pendapatan yang bersifat dan kewajiban Desa berdasarkan hak asli atau dan kewenangan desa-lokal Desa.

Pendapatan Transfer

Yaitu pendapatan desa yang berasal dari pemerintah negara desa yang menyediakan dana kepada desa sesuai amanat referensi yang berlaku. Pendapatan transfer meliputi dana desa bagi dan hasil park dan tributus kepada kabupaten/kota, siaga desa desa, dana dan kewenangan provinsi, dan bantuan wajib APBD (anggaran Pendapatan).

Pendapatan Pemerintah Desa Kalimantan Barat Tahun 2020-2023 (Miliar Rupiah)



Secara umum, total realisasi pendapatan transfer pemerintah desa untuk tahun pelajaran 2023-2024 periode 2023-2024.

Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian merupakan desa yang mampu menghasilkan sumber-sumber desa dalam memenuhi standar kemandirian desa, pemenuhan dan upaya untuk mencapai kemandirian. Dimungkinkan dengan cara memproduksi sumber-sumber pemerintahan desa yang dapat bersifat dengan jumlah pendapatan tersisa.

Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki rasio kemandirian desa terbesar yakni sebesar 9,4%



Pada rasio kemandirian tahun 2022, Kalimantan Barat masih berada di rasio yang lebih seiring dengan seluruh desa di Kalimantan Barat termasuk dalam kategori Desa Mandiri. Pemerintah desa harus tetap mengoptimalkan pengeluaran sumber daya dan memprioritaskan sektor-sektor yang berpotensi untuk memberikan Pendapatan Asli Desa.

